



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BIER BUDY KISMULYANTO
2. Jabatan : KEPALA KANTOR
3. NHK : 114047

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	4.766.486.000
1. Tanah Seluas 797 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 11.158.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 239 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.119.900.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 520 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 3.533.010.000		
4. Tanah Seluas 1249 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 102.418.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	138.000.000
1. MOTOR, YAMAHA JUPITER SEPEDA MOTOR Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
2. MOTOR, HONDA CBR SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA HARIER Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	58.436.085
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	328.823.754
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	5.291.745.839

**III. HUTANG****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

5.291.745.839

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.